

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengangguran Terbuka

2.1.1.1 Pengertian

Menurut (Mankiw, 2000) pengangguran merupakan sebuah masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan sebuah pekerjaan merupakan penurunan suatu standart kehidupan. Sedangkan menurut (Simanjutak, 1985) pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari presentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

Pengangguran terbuka merupakan salah satu jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yang mana dapat didefinisikan sebagai tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Menurut (Sukirno, 2000) pengangguran terbuka adalah presentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja.

Menurut Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwa meningkatnya pengangguran di suatu daerah dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, karena jumlah penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka ketika penduduk yang banyak tanpa ada penyediaan lapangan pekerjaan yang banyak pula akan mengakibatkan pengangguran semakin banyak. Pengangguran terbuka juga bisa diakibatkan oleh kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mana membuat suatu perusahaan mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

Tingginya pengangguran terbuka meindikasikan jika penduduk yang telah memasuki usia kerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk mengindikasikan besarnya presentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka memiliki rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{TPT} = \frac{\mathbf{JP}}{\mathbf{JAK}} \times 100\%$$

TPT : Tingkat pengangguran Terbuka (%)

JP : Jumlah Pengangguran (orang)

JAK : Jumlah Angkatan Kerja (orang)

2.1.1.2 Jenis-jenis Pengangguran

Menurut (Firdaus, 2007) jenis-jenis pengangguran dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pengangguran menurut lama waktu kerja

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan telah berusaha mencari pekerjaan secara maksimal, sementara lapangan kerja yang tersedia tidak cocok dengan latar belakang pendidikannya atau malas mencari pekerjaan.

2) Pengangguran Tidak Sepenuh Waktu/Setengah Pengangguran

Pengangguran tidak sepenuh waktu/setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan dan bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

3) Pengangguran Terselubung

Pengangguran terselubung tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

b. Jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya

1) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural disebabkan oleh ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan tenaga kerja yang tersedia berupa perubahan struktur permintaan penawaran dalam jangka panjang sebagai dampak kemajuan teknologi, perubahan selera, dan persaingan antar perusahaan.

2) Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal berkaitan dengan naik turunnya aktivitas atau keadaan perekonomian suatu negara yang mengalami masa pertumbuhan atau mengalami penurunan bahan depresi.

3) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya berkala. Pengangguran ini biasanya terjadi pada tenaga kerja paruh waktu.

4) Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional disebabkan oleh pergantian pekerjaan atau pergeseran tenaga kerja atau berpindah dari jenis pekerjaan tertentu ke jenis pekerjaan lain.

2.1.1.3 Dampak Pengangguran

Menurut (Sukirno, 2007) ada beberapa akibat buruk dari pengangguran, dibedakan menjadi dua aspek dimana diantaranya yaitu:

a. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat buruk tersebut meliputi:

- 1) Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang.

Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit.

3) Pengangguran tidak menggalakan pertumbuhan ekonomi.

Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan kelesuan kegiatan perusahaan yang rendah menyebabkan berkurangnya keinginan untuk melakukan investasi.

b. Akibat buruknya terhadap individu masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah:

1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.

2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan.

Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.

3) Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial politik.

Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintah.

2.1.1.4 Teori

Terdapat teori yang berkaitan dengan pengangguran (Mankiw, 2007):

a. Teori Klasik

Pada teori ini memiliki pandangan bahwa suatu pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas, yang dimana hal tersebut dapat dilakukan agar menjamin terciptanya permintaan yang dapat menyerap semua penawaran. Dengan demikian teori klasik memiliki pandangan bahwa penawaran tenaga kerja secara berlebih maka akan membuat upah menjadi menurun sehingga menyebabkan produksi perusahaan juga mengalami penurunan. Hal tersebut yang membuat permintaan tenaga kerja secara terus menerus meningkat, dikarenakan perusahaan dapat melakukan perluasan produksinya sebagai akibat dari keuntungan yang didapatkan dari rendahnya biaya yang dikeluarkan. Namun, apabila harga relatif stabil maka kelebihan tenaga kerja di pasar dapat terserap.

b. Teori Keynes

Pada teori ini menyatakan pandangan bahwa adanya pengangguran yang terjadi disebabkan rendahnya permintaan agregat. Pertumbuhan ekonomi yang terhambat dikarenakan rendahnya konsumsi yang ada dan bukan disebabkan oleh rendahnya produksi. Teori Keynes ini berlawanan dengan teori klasik yang berpandangan bahwa pada saat terjadinya peningkatan pada tenaga kerja maka upah akan turun, yang dimana hal tersebut akan membuat daya beli masyarakat terhadap barang

menurun, sehingga hal tersebut akan merugikan produsen yang mengakibatkan produsen tidak dapat menyerap tenaga kerja.

2.1.2 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)

2.1.2.1 Definisi

Menurut (BPS, 2017), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah suatu skala standar yang bisa mencerminkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Pada tahun 2008 *International Telecommunication Union* (ITU) dengan nama *ICT Development Index* mengembangkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dengan nama *ICT Development index* dan dipublikasikan pada tahun 2009 melalui buku "*Measuring thr Information Society*". Menurut (Wahyuningsih, 2013) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan seluruh peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi, dan mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

IP-TIK merupakan suatu indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator menjadi suatu ukuran standar pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah. Perhitungan ini berdasarkan metodologi dari *International Telecommunication Union* (ITU) yang terdapat 11 indiktaor penyusunan IP-TIK yang terbagi dalam tiga subindeks sebagai berikut:

a. Subindeks Akses dan Infrastruktur

Menggambarkan kesiapan TIK (*ICT readiness*) yang dapat diukur dari sisi akses dan infrastruktur TIK dengan lima indikator penyusun subindeks.

b. Subindeks Penggunaan

Menggambarkan intensitas TIK (*ICT intensity*) yang dapat diukur dari penggunaan IK dengan tiga indikator penyusun subindeks.

c. Subindeks Keahlian

Menggambarkan kemampuan atau keahlian yang diperlukan dalam TIK (*ICT Skill*) dengan tiga indikator penyusun subindeks.

Masing-masing indikator maupun subindeks memiliki bobot tersendiri seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penimbang Indikator dan Subindeks IP-TIK

Komponen	Penimbang Indikator	Penimbang Subindeks
Akses dan Infrastuktur		
• Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk	0,20	
• Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk	0,20	
• <i>Bandwidth</i> internet internasional per pengguna	0,20	0,40
• Presentase rumah tangga dengan computer	0,20	
• Presentase rumah tangga dengan akses internet	0,20	

Penggunaan		
• Presentase individu yang menggunakan internet	0,33	
• Pelanggan <i>fixed broadband</i> internet per 100 penduduk	0,33	0,40
• Pelanggan <i>mobile broadband</i> internet aktif per 100 penduduk	0,33	
Keahlian		
• Rata-rata lama sekolah	0,33	0,40
• Angka partisipasi lasar sekunder	0,33	
• Angka partisipasi kasar tersier	0,33	

Sumber: *International Telecommunication Union*, 2016

Untuk Skala pengukuran IP-TIK yaitu 0-10. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK pada suatu wilayah semakin pesat, atau sebaliknya jika nilai indeks semakin rendah maka menunjukkan bahwa pembangunan TIK di suatu wilayah tersebut relatif masih lambat. (BPS, 2020)

2.1.2.2 Teori

Terdapat teori yang berkaitan dengan teknologi dan ketenagakerjaan :

Teori Pertumbuhan Neoklasik (Solow-Swan)

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi (*technological progress*). Solow mengatakan bahwa di dalam

pertumbuhan ekonomi peran dari kemajuan teknologi ini sangat dominan, maka dari itu diperoleh fungsi produksi sebagai berikut :

$$Y = f[(K,L)E]$$

Dimana Y adalah output, K ada modal atau kapital, L adalah tenaga kerja atau labor dan E merupakan efisiensi tenaga kerja dan kapital akibat adanya teknologi yang digunakan selama proses produksi. Ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat dan mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi (Arsyad, 2016).

2.1.3 Angkatan Kerja

2.1.3.1 Pengertian Angkatan Kerja

Menurut (Sukirno, 2004) angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah pekerja atau tenaga kerja yang ada dalam ruang lingkup perekonomian dalam kurun waktu tertentu yang digolongkan menjadi kelompok yang sedang bekerja dan kelompok yang sedang menganggur namun sedang mencari pekerjaan. Menurut (Sukirno, 2008) untuk menemukan angkatan dan bukan angkatan kerja diperlukan informasi, yaitu:

- a. Jumlah penduduk yang berusia diantara 15 tahun dan 64 tahun disebut dengan penduduk usia kerja.
- b. Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja (seperti mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela), penduduk ini dinamai dengan penduduk bukan angkatan kerja. Dengan

demikian angkatan kerja pada suatu periode dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan bukan angkatan kerja.

2.1.3.2 Jenis Angkatan Kerja

Pada dasarnya, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1) Angkatan kerja

Angkatan kerja dapat dijelaskan dengan beberapa definisi yaitu angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu (Sukirno, 2008). Berdasarkan definisi yang telah di kemukakan angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan , baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu alasan. Angkatan kerja terdiri dari pengangguran dan penduduk bekerja. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang mempersiapkan usaha atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja. Penanggur dengan konsep ini disebut dengan pengngguran terbuka.

Sedangkan penduduk bekerja didefinisikan sebagai penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Penduduk yang bekerja

dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja).

2) Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja. Golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan *potential labor force* (Sholehati, 2017).

2.1.3.3 Teori

Terdapat beberapa teori penting dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Adapun teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya

manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut teori klasik Adam Smith pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tinggi dapat mengurangi pengangguran yang ada di wilayah tersebut. Artinya pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus terhadap tingkat pengangguran.

2. Teori Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi. Kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga.

Jika harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal tenaga kerja (*marginal value of productivity of labor*) yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan labor akan

turun. Jika penurunan harga tidak begitu besar maka kurva nilai produktivitas hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi jika harga-harga turun drastis, ini menyebabkan kurva nilai produktivitas marjinal tenaga kerja turun drastis pula dan jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin luas. Menurut teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah, sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi.

3. Teori Malthus

Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Thomas Robert Malthus mengungkapkan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahwa penduduk berkembang lebih pesat, maka akan timbul jumlah angkatan kerja yang banyak pula, dan hal ini tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia. Maka dari sini akan muncul pengangguran yang tercipta karena jumlah angkatan kerja yang tak sebanding dengan kesempatannya.

4. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar (1946) dikenal sebagai teori pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, akan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti

dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2.1.4 Rata-rata Lama Sekolah

2.1.4.1 Pengertian Rata-rata Lama Sekolah

Menurut (Smith, 2006), pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi mereka. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan pengendalian diri, membangun kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan aset manusia yang memiliki peran krusial dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas suatu negara, karena berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan masyarakat untuk menjadi lebih kompeten dan terampil. Oleh karena itu, dengan adanya keterampilan tersebut, masyarakat dapat menghasilkan lebih banyak output dan berkontribusi positif terhadap perbaikan kondisi perekonomian.

Tingkat pendidikan suatu masyarakat dapat tercermin dari indikator rata-rata lama sekolah, yang mencerminkan jumlah tahun standar yang biasanya dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan pendidikan formal. Angka rata-rata

lama sekolah yaitu jumlah rata-rata tahun yang dihabiskan seseorang dalam menyelesaikan pendidikan formal. Angka rata-rata Lama Sekolah atau *Mean Years of Schooling* (MYS) adalah hasil dari kombinasi antara partisipasi dalam pendidikan, tingkat pendidikan yang sedang dijalani, tingkat kelas yang telah diselesaikan, dan pencapaian pendidikan. Namun, jumlah tahun bersekolah ini tidak mempertimbangkan kasus-kasus di mana seseorang yang tidak naik kelas, mengalami putus sekolah yang kemudian kembali melanjutkan, atau memulai pendidikan dasar pada usia yang sangat muda atau sebaliknya (Badan Pusat Statistik, 2010).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan bagian penting dari elemen pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Badan Pusat Statistik (2020) menyatakan bahwa Rata-rata Lama Sekolah adalah durasi rata-rata dalam tahun pendidikan formal yang diselesaikan oleh individu yang berusia 15 tahun ke atas. Cerminan tingkat pendidikan secara keseluruhan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas. Pada tahun 1990 UNDP telah memformulasikan angka rata-rata lama sekolah untuk menyusun Indeks Pembangunan Manusi (IPM) dimana angka tersebut dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi program wajib belajar nasional (Badan Pusat Statistik, 2010).

Rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani merupakan definisi dari rata-rata lama sekolah. Angka tersebut menggambarkan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah dapat dihitung menggunakan variabel partisipasi, tingkat atau kelas yang sedang atau pernah dijalani dan ijazah terakhir yang dimiliki. Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dihitung dalam rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka pendidikan yang ditamatkan akan semakin lama atau tinggi pula. perencanaan dan evaluasi program

wajib belajar nasional (Badan Pusat Statistik, 2010).

Rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani merupakan definisi dari rata-rata lama sekolah. Angka tersebut menggambarkan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah dapat dihitung menggunakan variabel partisipasi, tingkat atau kelas yang sedang atau pernah dijalani dan ijazah terakhir yang dimiliki. Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dihitung dalam rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka pendidikan yang ditamatkan akan semakin lama atau tinggi pula.

2.1.4.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur didalam undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Didalam undang-undang tersebut memuat segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia. Mengacu pada undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional maka fungsi dari pendidikan terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi

pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional.

Tujuan Pendidikan Nasional, sesuai dengan Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan kebudayaan, maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dalam UU No. 2 tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sebagaimana diungkapkan oleh A. Tresna Sastrawijaya, tujuan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup kesiapan jabatan, keterampilan memecahkan masalah, penggunaan waktu senggang secara membangun, dan sebagainya karena harapan setiap siswa berbeda-beda.

Pemerintah telah merencanakan program wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Tujuan dari program tersebut yaitu untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada penduduk usia 16-19 tahun atau peserta didik tingkat SMA, SMK, MA atau sederajat.

2.1.4.3 Teori

Teori Human Capital

Teori *Human Capital*, teori ini menyatakan bahwa investasi dalam dunia pendidikan dapat memperbaiki kualitas produktifitas masyarakat, kualitas masyarakat semakin baik apabila kualitas pendidikannya baik, karena dengan adanya pendidikan seseorang dapat keluar dari garis lingkaran kemiskinan.

Indikator tingkat pendidikan di suatu daerah dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah. Pendidikan ialah suatu bentuk human capital yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia. (Becker, 1964) dalam bukunya "*Human Capital*" mengemukakan pendidikan dapat memiliki peranan penting dalam kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, ia menjelaskan bahwa seseorang yang menempuh pendidikan tinggi maka akan mendapatkan pekerjaan serta upah yang lebih layak dan menghindarkan seseorang dari kemiskinan. BPS menyampaikan bahwa salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan yaitu menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. IPM menjadikan indeks pendidikan sebagai salah satu aspek untuk bahan evaluasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Metode baru cara untuk mengukur pendidikan masyarakat berdasarkan IPM ialah dengan melihat angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Mankiw dan Gregory berpendapat bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi individu, apabila semakin tinggi pendidikan maka akan meningkat pula kesejahteraan suatu individu. Sehingga hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan

ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Davenport (Atmanti, 2005) *Human Capital* sebagai seluruh tenaga kerja untuk diinvestasikan dalam pekerjaan. Termasuk di dalamnya kemampuan, tingkah laku, semangat dan waktu. Jadi human capital adalah nilai dan atau kualitas dari seseorang atau tenaga kerja yang menentukan seberapa potensial orang atau tenaga kerja tersebut bisa memproduksi dalam perekonomian terutama dalam menghasilkan barang dan jasa.

Asumsi dasar teori *human capital* adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, di satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Disamping penundaan menerima penghasilan tersebut, orang yang melanjutkan sekolah harus membayar biaya secara langsung seperti uang sekolah, pembelian buku-buku dan alat-alat sekolah. Maka jumlah penghasilan yang diterimanya, dihitung dalam nilai sekarang atau *Net Present Value*.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul yang Diteliti	Persamaan/Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nelva Siskawati, Roberta Z. Surya, Endy Sudeska (2022) Pengaruh Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kab/kota	Persamaannya terdapat variabel independen yang sama yaitu rata-rata lama sekolah. Perbedaannya terdapat variabel dependen yang berbeda yaitu pengaruh harapan lama sekolah.	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel rata-rata lama sekolah secara simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka walaupun dalam presentase yang sedikit.	Jurnal Selodang Mayang, Vol 7 No 3 (2021)
2.	Aisyah Sisnita, Nano Prawoto (2017) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung (Periode 2009 - 2015).	Persamaannya yaitu meneliti tingkat pengangguran terbuka . Perbedaannya Tidak meneliti IP-TIK terhadap tingkat Pengangguran Terbuka.	Hasil penelitian menyatakan bahwa, jumlah penduduk dan IPM secara signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Journal of Economics Research and Social Scienses, Vol 1, No 1 (2017)
3.	Cherrly Wahyuni dan Ali Anis (2019) Pengaruh Investasi Luar Negeri, Pendidikan dan Teknologi Informasi-	Persamaannya terdapat salah satu variabel bebas yang sama yaitu IP-TIK. Perbedaannya diwilayah yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi luar negeri berhubungan positif dengan partisipasi angkatan kerja	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Vol 1, No 3 (2019)

	Komunikasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia.	diteliti adalah wilayah pulau jawa sedangkan penelitian terdahulu wilayah indonesia.	di Indonesia, sementara pendidikan dan teknologi informasi komunikasi berhubungan negatif.	
4.	Nenny Latifah, Debby, dan Richard (2017) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Dampaknya pada Jumlah Penduduk Miskin di Kota Manado.	persamaannya menggunakan variabel terikat yang sama yaitu tingkat pengangguran terbuka. Perbedaannya menggunakan variabel independen yang berbeda.	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi dan IPM secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan dan bersifat positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 17, No. 02 (2017)
5.	Tiara Nurhapsari (2022) Pengaruh Investasi Pma, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Kepadatan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006 – 2020.	Persamaannya menggunakan salah satu variabel bebas yang sama yaitu rata-rata lama sekolah dan persamaan wilayah yang diteliti. Perbedaannya tidak terdapat variabel IP-TIK dan rentang waktu.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah dan Kepadatan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.	Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023)
6.	Anzas Fernando Sirait, Yulmardi Adi Bhakti (2018)	Persamaannya menggunakan data panel dan	Hasil penelitian ini menun-	e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan

	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.	menggunakan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel terikat. Perbedaanya menggunakan variabel bebas yang berbeda.	jukkan bahwa secara simultan, upah, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka. Secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.	Pembangunan Daerah, Vol. 7 No. 3 (2018)
7.	M. Arizal, Marwan (2019) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat.	Persamaanya menggunakan data panel dan menggunakan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel terikat. Perbedaanya menggunakan variabel bebas yang berbeda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.	Jurnal Ecogen Vol 2, No. 3 (2019)
8.	Tengko Sarimuda RB (2014) Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi terhadap Tingkat	Persamaanya menggunakan data panel dan menggunakan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel terikat. Perbedaannya wilayah penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB, UMK berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 2 (2014)

	Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur.	dan variabel bebas berupa IP-TIK	Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Variabel Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan.	
9.	Deasy Dwi Ramiayu Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jawa Timur.	Persamaanya menggunakan salah satu variabel bebas yang sama yaitu rata-rata lama sekolah. Perbedaanya pada wilayah yang diteliti.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Namun, upah minimum di kabupaten/kota tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol 4, No. 2 (2016)
10.	Maria G. Egeten, George M.V Kawung, Krest D.Tolosang Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota-Kota yang Ada di Provinsi Sulawesi Utara.	Persamaanya menggunakan angkatan kerja sebagai salah satu variabel bebas dalam penelitian. Perbedaannya pada wilayah penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota-Kota yang ada di Provinsi Sulawesi	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 23 No. 3 (2023)

			Utara. Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota-Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tingkat Pendidikan dan Jumlah Angkatan Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.	
11.	Yulita Dwi Anggraini (2018)	Persamaanya menggunakan angkatan kerja sebagai salah satu variabel bebas dalam penelitian. Perbedaananya pada wilayah penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angkatan Kerja memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Namun, variabel pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat	Repository Universitas Jember

			pengangguran terbuka di wilayah tersebut.	
12.	Alfinatus Suroya,Rendra Erdkhadifa (2023) Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.	Persamaanya menggunakan angkatan kerja sebagai salah satu variabel bebas dalam penelitian. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yang digunakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, IPM, Jumlah Penduduk dan Jumlah Angkatan Kerja tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.	Jurnal EK & BI, Vol. 6, No. 1 (2023)
13.	Amgi Filiasari1 Achma Hendra Setiawan Pengaruh Angkatan Kerja, Upah, Pdrb, dan Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2002-2019.	Persamaanya menggunakan angkatan kerja sebagai salah satu variabel bebas dalam penelitian. Perbedaannya pada wilayah penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angkatan Kerja, Upah, dan PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Meskipun demikian, Pendidikan justru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi	Diponegoro Journal of Economics, Vol 10, No 2 (2021)

				Banten pada periode tersebut.	
14.	Debby Istiandari	Nindya	Persamannya menggunakan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel terikat dan Pulau Jawa sebagai lokasi penelitian. Perbedaannya pada periode tahun dan variabel bebas yang digunakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB sektor primer dan sekunder berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa. Sedangkan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Jurnal Koperasi dan Manajemen, Vol 03, No 02 (2022)
	Pengaruh Variabel Ekonomi dan Variabel Demografi terhadap Tingkat Pengangguran Enam Provinsi di Indonesia.	dan			
15.	Rhivna Rambe, Hari Prihanto, Hardiani	Cilviyani Purwaka	Persamaannya terdapat pada penggunaan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel terikat. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan variabel bebas yang digunakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.	e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Vol 8, No 1 (2019)
	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi	Faktor-			

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sebuah gambaran holistik mengenai hubungan antara variabel yang dibentuk dari teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan uraian teori-teori tersebut, langkah berikutnya adalah melakukan analisis yang kritis dan terstruktur untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Hasil sintesis mengenai hubungan variabel tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2009).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memilih variabel Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai (Y), Variabel Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) sebagai (X1), variabel Angkatan Kerja sebagai (X2), dan variabel Rata-rata Lama Sekolah sebagai (X3).

2.2.1 Keterkaitan Antar Variabel

1. Hubungan antara Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut BPS (2017), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) ialah suatu skala standar yang bisa mencerminkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Perkembangan TIK memiliki dampak bagi tenaga kerja. Pengembangan teknologi mampu menggeser posisi para tenaga kerja yang bisa digantikan oleh teknologi. Dengan adanya teknologi

perusahaan akan lebih memilih untuk menggunakan teknologi dalam jangka waktu yang panjang untuk memperoleh keuntungan yang tinggi serta dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya tenaga kerja.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Wahyuni, 2019) yang menyatakan bahwa teknologi mempunyai pengaruh negatif pada tingkat partisipasi angkatan kerja, yang dimana semakin tinggi teknologi maka semakin menurun tingkat partisipasi angkatan kerja dikarenakan posisi para pekerja digantikan oleh teknologi yang berkembang pesat. Hal ini juga sejalan dengan Solow bahwa teknologi berpengaruh terhadap tenaga kerja. Ketika teknologi mengalami kemajuan maka efisiensi tenaga kerja meningkat. Efisiensi tenaga kerja dapat mencerminkan bagaimana ilmu pengetahuan masyarakat mengenai metode-metode yang dapat digunakan dalam proses produksi (Mankiw, 2006).

2. Hubungan antara Angkatan Kerja dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Teori Thomas Robert Malthus (1766-1834) menyatakan bahwa populasi manusia berkembang lebih cepat sehingga akan menimbulkan jumlah angkatan kerja yang banyak, hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Sehingga hal tersebut akan memicu pengangguran yang tercipta karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada, hal tersebut terjadi dikarenakan pasokan angkatan kerja yang belum sepenuhnya terserap akan kembali meningkat dengan angkatan kerja yang baru dan akan terus bertambah.

Peningkatan angkatan kerja bisa menjadi hal yang baik, apabila peningkatan angkatan kerja diimbangi dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja. Namun, jika yang terjadi sebaliknya angkatan kerja tidak diimbangi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang mendapatkan pekerjaan, maka yang akan terjadi yaitu jumlah pengangguran meningkat yang diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan yang menampung angkatan kerja yang ada (Mulyadi, 2003).

Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria G. Egeten, George M.V Kawung, Krest D.Tolosang (2023) bahwa Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Jika angkatan kerja naik, maka tingkat pengangguran pun akan meningkat.

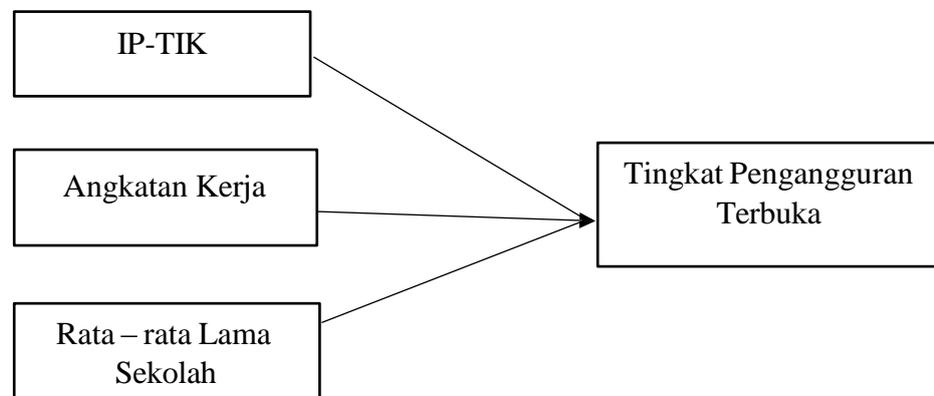
3. Hubungan antara Rata-rata Lama Sekolah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Rata-rata Lama Sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan dalam Indeks Pengembangan Manusia. Menurut BPS (2020), Rata-rata Lama Sekolah merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun keatas.

Pendidikan formal dapat meningkatkan keterampilan masyarakat merupakan salah satu peranan yang sudah diakui oleh semua negara. Menurut Todaro (2000), pendidikan formal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi dapat juga memberikan nilai-nilai, cita-cita, sikap, dan aspirasi secara langsung

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan. Dengan adanya sistem pendidikan seperti kurikulum yang telah diatur oleh pemerintah, maka pendidikan formal dapat dikatakan lebih mampu menjamin kualitas masyarakatnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia dapat meningkat melalui pendidikan, sehingga semakin lama masyarakat menempuh dan lulus pendidikan formal, maka akan semakin tinggi pula kualitas dan kemampuan masyarakat, maka dari itu dari pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesempatan bersaing dalam pasar tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Dari rumusan permasalahan yang ada, dirumuskan hipotesis :

1. Diduga IP-TIK dan angkatan kerja berpengaruh positif, dan rata-rata lama sekolah secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah Pulau Jawa tahun 2012-2021.
2. Diduga IP-TIK, angkatan kerja, dan rata-rata sekolah secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah Pulau Jawa tahun 2012-2021.